

MODEL PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MISKIN DI PEDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh

Sri Widati, Juang Sunanto, Sunaryo, Nandi Warnandi, dan Ahmad Mulyadiprana

Jurusan PLB FIP UPI Bandung.

e-mail: plbupi @ yahoo.com

ABSTRACT

Problem on this research is that there are still many poor Special Need Children (ABK: Anak Berkebutuhan Khusus) who live in the countryside do not go to school. This problem occurred because of high budgeting for developing education for ABK in SLB. As the result of it, the poor ABK in countryside could not get the education they need. In the Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur West Java, there were about 66 ABK who did not get special education because of their poverty. The solution to this problem is to empower community by giving them the training about how to teach ABK. The goal of this research is to find out educational model for poor ABK in countryside through community empowerment. Then the problem is defined as "What effective educational model for poor ABK who live in countryside?"

The research was conducted in Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur West Java during 2 years in a row; year 2008 and year 2009. Subject on this research is community who care about ABK and they are about 30. The approach applied on this research is qualitative and quantitative. The data were collected by observation, interview, questionnaires and test methods.

After doing this research, it was found that:

First, causal factor for ABK who do not go to school are economic factor of poor ABK families, the distance between ABK residence and school location, psychological factor, educational background of ABK parents, social factor, and regular school teachers who have no ability of teaching ABK. Second, available support sources in Kecamatan Sukanagara to give education to ABK, these are; community who care about education for ABK, the nature of strong togetherness in community, supportive country chairman, the positive attitude of PKBM chairman who accepts ABK, and the recognition from Depdiknas. Third, the effective educational model for poor ABK in countryside is through empowering the caring community.

Key words: Model of Education for Special Need Children.

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah masih banyaknya anak berkebutuhan khusus (ABK) yang miskin di pedesaan tidak dapat sekolah. Masalah ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan bagi ABK di SLB. Di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat, terdapat 66 ABK yang tidak dapat sekolah karena miskin. Solusi dari masalah ini adalah melatih masyarakat tentang cara mengajar ABK. Tujuan penelitian ini untuk menemukan model pendidikan bagi ABK yang miskin di pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga masalahnya dirumuskan: "Bagaimanakah model pendidikan yang efektif bagi ABK yang miskin di pedesaan?"

Subyek penelitian terdiri dari masyarakat yang peduli pada ABK berjumlah 30 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, angket, dan metode tes..

Setelah diteliti, maka ditemukan bahwa:

Pertama, faktor penyebab ABK tidak dapat sekolah adalah faktor ekonomi keluarga yang miskin, tempat tinggal ABK yang jauh dari lokasi sekolah, faktor psikologis, latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial, dan guru sekolah umum yang belum mampu mengajar ABK.

Kedua, sumber dukungan yang ada di Kecamatan Sukanagara adalah: masyarakat yang peduli pada pendidikan ABK, kebudayaan gotong royong, dukungan dari kepala desa, sikap yang positif dari ketua PKBM, dan perhatian dari Depdiknas.

Ketiga, model pendidikan yang efektif bagi ABK yang miskin di pedesaan adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang peduli.

Kata kunci: Model Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK)

A. LATAR BELAKANG

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan anak normal. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga negara, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Kerangka aksi mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus (Unesco,1994) mengakui prinsip bahwa sekolah seyogyanya mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik ataupun kondisi-kondisi lainnya. Ini seyogyanya mencakup anak cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak kaum buruh, anak dari penduduk terpencil, anak dari keluarga miskin, pengembara, anak dari kelompok masyarakat minoritas secara linguistik, etnik ataupun budaya.

Mengacu pada estimasi WHO dimana jumlah penyandang cacat adalah 5% dari jumlah penduduk, maka dapat diperkirakan jumlah penyandang cacat di Indonesia sekitar 12.000.000 orang. Menurut sensus penduduk tahun 2003, penyandang cacat usia sekolah adalah 21 % atau sebanyak 2.520.000. Sementara itu, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa melaporkan bahwa ABK yang telah mendapat akses pendidikan (bersekolah) baru sekitar 10% atau sebanyak 252.000 anak dan sisanya 90% atau 2.268.000 anak belum mendapat akses pendidikan. Sebagian besar ABK

yang telah mendapat layanan pendidikan adalah mereka yang tinggal di perkotaan dan mereka sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Di Indonesia, terdapat SLB yang sebagian besar berlokasi di kota dan kabupaten. Karena itulah sebagian besar anak penyandang cacat di pedesaan belum mendapat akses pendidikan. Di samping itu, ada juga faktor sosiologis, ekonomis, dan psikologis yang menyebabkan anak-anak penyandang cacat di pedesaan tidak mendapat akses pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan bagi ABK di Sekolah Luar Biasa (SLB) ternyata membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk mengakselerasi belajarnya baik untuk melengkapi ruangan dan sarannya serta alat-alat bantu khusus yang diperlukan. Pendidikan yang mahal tersebut sudah barang tentu tidak akan terjangkau oleh ABK yang miskin dan di pedesaan, sehingga mereka banyak yang tidak bersekolah.

Hal tersebut merupakan masalah, disatu sisi ABK harus bersekolah (Wajib Belajar), namun disisi lain ABK yang miskin tidak dapat bersekolah karena biaya pendidikan yang mahal. Masalah ini ternyata dialami oleh ABK yang miskin di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Solusi dari masalah ini dapat dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat yang peduli. Karena masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Disamping itu, masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Tampaknya masyarakat di Kecamatan Sukanagara mempunyai potensi yang dapat diberdayakan untuk mendidik anak berkebutuhan khusus yang miskin di desanya.

Berdasarkan hasil penjarangan mahasiswa PLB FIP UPI dalam kegiatan PPM tahun 2007 di Kecamatan Sukanagara terdapat 66 ABK yang tidak dapat sekolah karena miskin. Oleh karena itu, perlu diteliti tentang model pendidikan bagi ABK yang miskin di pedesaan sebagai solusinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang miskin di pedesaan yang tidak bersekolah karena biaya penyelenggaraan sekolah luar biasa (SLB) yang mahal. Oleh

karena itu, perlu diadakan penelitian untuk menemukan model pendidikan bagi ABK yang miskin di pedesaan. Dalam penelitian ini masalah dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah model pendidikan yang efektif bagi ABK yang miskin di pedesaan?". Rumusan masalah tersebut dirinci menjadi beberapa pertanyaan operasional yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan ABK yang miskin di pedesaan tidak mendapat akses pendidikan?
2. Sumber dukungan apa sajakah yang ada di masyarakat pedesaan untuk memberikan layanan pendidikan bagi ABK?
3. Bagaimanakah model pendidikan yang efektif bagi ABK yang miskin di pedesaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tema utama penelitian ini berkenaan dengan perluasan kesempatan belajar atau akses pendidikan bagi ABK. Kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun tidak terlepas dari persoalan ABK yang sebagian besar belum mendapat akses pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk mempercepat pemerataan pendidikan bagi ABK.

Tujuan umum penelitian ini adalah merumuskan model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang miskin di pedesaan.

Adapun tujuan khususnya adalah untuk:

1. Menemukan faktor-faktor penyebab ABK yang miskin di pedesaan tidak bersekolah
2. Mengungkap sumber-sumber dukungan yang ada di masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan pada ABK.
3. Mengetahui kemampuan masyarakat/kader sebelum diberikan pelatihan cara mengajar ABK.
4. Mengetahui kemampuan masyarakat/kader setelah diberi pelatihan.
5. Mengetahui efektivitas model pendidikan bagi ABK yang miskin di pedesaan

D. KAJIAN TEORI

Model pendidikan bagi ABK berkembang dari (1) sekolah segregasi atau sekolah khusus, (2) sekolah terpadu, dan (3) sekolah inklusif. Hampir di seluruh negara memiliki kecenderungan perkembangan pendidikan bagi ABK dengan pola yang hampir sama, yaitu dari segregasi menuju inklusif.

1. Sekolah Segregasi

Sejak ABK memperoleh layanan pendidikan, model sekolah bagi ABK yang telah ada sejak lama adalah sekolah khusus yang di Indonesia dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah khusus ini biasanya dibuka secara khusus untuk setiap jenis kecacatan tertentu seperti sekolah khusus untuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras dan lain-lain. Sekolah khusus ini dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa ABK memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dengan anak pada umumnya. Oleh karena itu, dalam proses pendidikannya, mereka dianggap memerlukan pendekatan, metoda, program serta alat-alat yang khusus. Dan lagi, pendidikan (sekolah) bagi mereka harus dipisahkan dari pendidikan (sekolah) anak pada umumnya. Konsep pendidikan seperti inilah yang disebut dengan sistem pendidikan *segregasi* atau terpisah.

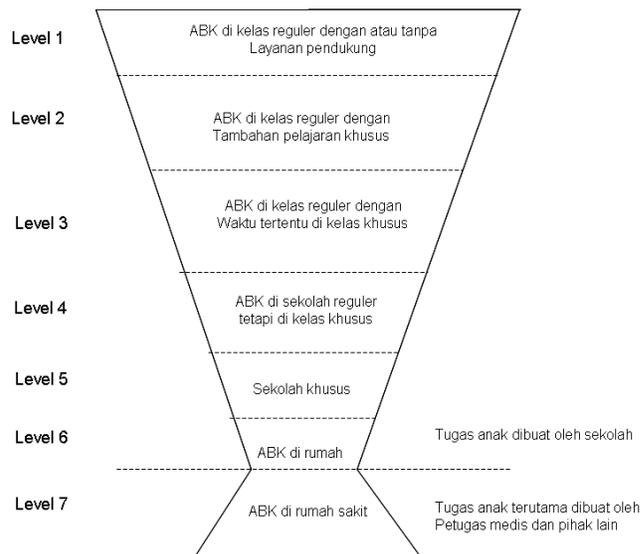
Di Indonesia upaya untuk memberikan pendidikan kepada ABK pada dasarnya telah dirintis sebelum Indonesia merdeka. Pada awalnya bersifat sporadik, karena belum diorganisir dan dikoordinir oleh suatu badan atau instansi, dan masih merupakan usaha perorangan yang mempunyai perhatian kepada ABK. Adapun penyelenggaraan sekolah khusus secara formal mulai dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pokok Pendidikan (UUPP) No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (Sunardi, 1997).

2. Sekolah Integrasi (Terpadu)

Pada tahun 1970an, di Amerika Serikat timbul kesadaran perlunya ABK untuk belajar bersama-sama dengan anak pada umumnya di sekolah yang sama. Bersamaan dengan itu muncul konsep *mainstreaming* dan *normalization*, yaitu gerakan yang menghendaki agar ABK dididik dalam situasi yang sama dengan anak pada umumnya dan mendekati kondisi yang normal. Sebagai konsekuensi promosi konsep *mainstreaming* dan *normalization* ini, semua sekolah reguler tidak boleh

menolak ABK yang ingin masuk ke sekolah reguler (Zero reject) dan mereka harus ditempatkan sama dengan anak pada umumnya semampu mungkin dengan dukungan dan layanan tambahan (*least restrictive environment*).

Terkait dengan tuntutan tersebut, dikembangkan sitem integrasi untuk ABK di sekolah reguler atas dasar tingkat keterpaduannya yang meliputi tujuh level, yaitu (1) ABK di kelas reguler dengan atau tanpa bantuan dan layanan khusus, (2) ABK di kelas reguler dengan dukungan pelajaran tambahan, (3) ABK di kelas reguler dengan waktu tertentu di kelas khusus, (4) ABK di sekolah reguler tetapi belajar di kelas khusus, (5) ABK di sekolah khusus, (6) ABK belajar di rumah dengan tugas-tugas yang dirancang oleh sekolah, (7) ABK belajar di tempat perawatan khusus seperti rumah sakit dengan tugas-tugas disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti pekerja sosial, dokter, dan lain-lain. Secara skematis sistem layanan pendidikan bagi ABK tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Model penempatan ABK di Sekolah Integrasi (Deno, dalam Haring, 1982:13).

Pada tahun tujuh puluhan terjadi gerakan yang kuat terhadap penyatuan pendidikan anak penyandang cacat bersama-sama dengan anak pada umumnya di sekolah biasa yang disebut dengan integrasi. Integrasi adalah penyediaan pendidikan

yang berkualitas bagi siswa-siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah biasa.

Dalam sistem pendidikan integrasi ABK mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler bersama anak-anak pada umumnya. Akan tetapi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler ini mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, misalnya IQnya normal, tidak memiliki gangguan perilaku, tidak ada hambatan komunikasi dan sebagainya. Dengan kata lain mereka dapat sekolah di sekolah reguler jika mampu menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di sekolah tersebut.

3. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap keberagaman karakteristik dan kebutuhan anak. Di samping itu, pendidikan inklusif didasarkan pada hak asasi, model sosial, dan sistem yang disesuaikan pada anak dan bukan anak yang menyesuaikan pada sistem. Selanjutnya, pendidikan inklusif dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan anak, pendidikan, keberagaman, dan diskriminasi, proses partisipasi dan sumber-sumber yang tersedia (Stubbs, 2002:9).

Beberapa dokumen internasional yang penting dan mendasari pendidikan inklusif yang telah disepakati oleh banyak negara termasuk Indonesia antara lain, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat tahun 1993, Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994, Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia tahun 2000 dan yang lainnya

Secara konseptual, dengan diterapkannya pendidikan inklusif memungkinkan ABK bersekolah di sekolah manapun sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi kenyataannya belum banyak sekolah di Indonesia yang siap menerima ABK dengan berbagai alasan baik alasan teknis maupun nonteknis. Tidak ada peralatan khusus, guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar ABK, hadirnya ABK

dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan sebagainya sering menjadi alasan untuk tidak menerima ABK.

E. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab masalah penelitian ini diperlukan data kualitatif dan kuantitatif serta prosedur yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan campuran ini digunakan sebagaimana saran Creswell (1994: 174) yang menyatakan bahwa kombinasi pendekatan tepat digunakan untuk penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang bervariasi.

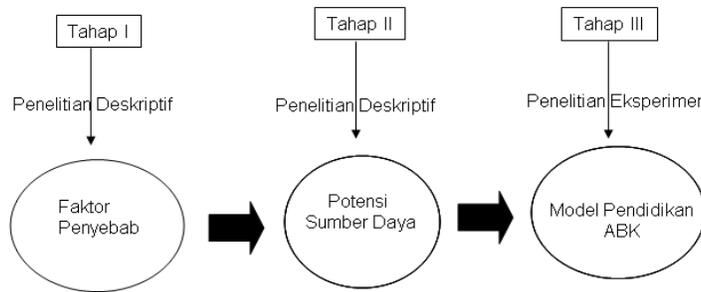
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap di mana masing-masing tahapan terfokus untuk menjawab satu rumusan masalah.

Tahap I, terfokus pada penemuan faktor-faktor penyebab mengapa ABK di pedesaan tidak mendapat akses pendidikan dan identifikasi potensi sumber daya masyarakat untuk memberikan layanan pendidikan. Pada tahap ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Tahap II, terfokus pada perumusan model layanan pendidikan bagi ABK di pedesaan. Pada tahap ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*).

Tahap III, berkaitan dengan pengujian efektivitas model yang dihasilkan dari tahap II. Pada tahap ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen.

Data penelitian yang bersifat kualitatif dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*), analisis domain (*domain analysis*), dan analisis Taksonomi (*taxonomy analysis*). Sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan analisis statistik deskriptif. Hubungan masing-masing tahap secara keseluruhan dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut.



Gambar 2 Kaitan Penelitian Tahap I, II, III

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan angket dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tidak bersekolah yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Dari 30 responden, semua menyatakan bahwa penyebab ABK tidak sekolah karena orang tuanya miskin. Kebanyakan sebagai buruh tani yang menggarap sawah orang lain dengan upah sehari Rp. 10.000,- kalau ada yang menyuruh, kalau tidak ada ya menganggur. Dengan pendapatan yang tidak menentu, maka anaknya tidak disekolahkan dengan kendala masalah biaya.

b. Faktor Tempat Tinggal

Pada umumnya tempat tinggal ABK adalah jauh dari sekolah umum, apalagi di desa tersebut belum ada SLB. Untuk menuju sekolah diperlukan biaya transportasi dengan ojek yang mahal, sehingga orang tua merasa keberatan menyekolahkan anaknya.

c. Faktor Psikologis

Dengan kehadiran anak yang mengalami kecacatan, para orang tua merasa ada beban mental yang berat, sehingga ada yang merasa malu, menolak, dan sebaliknya merasa kasihan dan sangat melindungi atau overproteksi. Akhirnya anak tidak disekolahkan karena menganggap tidak mampu apa-apa.

d. Faktor Pendidikan Orang Tua

Kebanyakan orang tua ABK adalah lulusan SD dan malah ada beberapa orang yang tidak lulus SD, sehingga tidak memahami kondisi dan kemampuan anaknya yang cacat, tidak paham akan pentingnya pendidikan bagi ABK, karena mereka juga tidak sekolah.

e. Faktor Sosial

Para orang tua merasa malu membawa anaknya yang cacat ke sekolah, takut diejek oleh orang lain, akhirnya anak dibiarkan saja di rumah tidak dapat bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain.

f. Faktor guru sekolah umum

Berhubung di kecamatan Sukanagara belum ada SLB, ada beberapa ABK yang mencoba sekolah di sekolah umum, akan tetapi karena guru umum belum memahami cara mengajar ABK, maka pendidikan bagi mereka kurang maksimal, akhirnya ABK keluar lagi dari sekolah.

Adapun sumber-sumber dukungan yang ada di kecamatan Sukanagara untuk memberikan layanan pendidikan pada ABK ialah:

1) Masyarakat yang peduli

Ternyata banyak masyarakat yang peduli terhadap pendidikan ABK terbukti pada saat diadakannya pelatihan, banyak masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan tentang cara mengajar ABK.

2) Kebudayaan gotong royong yang masih kuat

Kebudayaan gotong royong di desa yang masih kuat menjadikan masyarakat saling membantu dan bekerja sama. Begitu pula dengan pendidikan ABK di desanya, masyarakat saling membantu tetangganya yang mempunyai anak ABK untuk belajar. Orang tua yang bekerja sampai sore menitipkan anaknya yang ABK ke masyarakat atau tetangganya untuk belajar sebagai perwujudan dari kerjasamanya.

3) Para kepala desa yang mendukung

Para kepala desa yang diteliti sangat mendukung pendidikan ABK di desanya, malahan ada seorang kepala desa yang menawarkan tanahnya untuk didirikan SLB

4) Sikap ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang menerima ABK belajar ditempatnya, sehingga dapat dibentuk kelompok belajar ABK di masyarakat.

5) Perhatian dari pemerintah

Terutama dari pihak Depdiknas Cianjur telah menyediakan lahan untuk mendirikan SLB di Kecamatan Sukanagara.

Dari hasil temuan data-data tersebut disusunlah model pendidikan yang sesuai bagi ABK yang miskin di pedesaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab dan pendukung yang telah ditemukan. Tampaknya model pendidikan yang sesuai adalah melalui pemberdayaan masyarakat, mengingat beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a) Dengan memberdayakan masyarakat, secara ekonomi biaya sekolah lebih murah
- b) Dengan memberdayakan masyarakat setempat, ABK tidak usah jauh-jauh sekolah ke kota yang ada SLB nya, sehingga uang transportasi dapat dihemat.
- c) Dengan memberdayakan masyarakat sekitarnya, para orang tua akan berkurang beban mentalnya, karena merasa dibantu anaknya diajar oleh tetangga atau saudaranya sendiri. Secara psikologis akan mengurangi tekanan batinnya.
- d) Dengan memberdayakan masyarakat yang peduli ternyata dapat meringankan beban ekonomi, psikologis, dan sosial bagi orang tua ABK yang miskin di desa, sehingga banyak keuntungannya daripada kerugiannya.
- e) Masyarakat yang terdiri dari para guru umum akhirnya dapat mengajar ABK yang belajar di sekolahnya, sehingga dapat mengembangkan potensi anak secara optimal.

Agar dapat mengajar ABK, pada tahun 2008 masyarakat atau kader diberi pelatihan terlebih dahulu tentang cara mengajar calistung, kegiatan hidup sehari-hari dan keterampilan dasar pada ABK. Hasilnya yang tadinya masyarakat tidak tahu dan tidak mampu, setelah diberikan pelatihan menjadi tahu dan mampu mengajar ABK dengan baik. Tahun 2009 pelatihan dilanjutkan dengan cara mengajar membaca menulis huruf Braille pada anak tunanetra, cara mengajar bahasa isyarat pada anak tunarungu, cara mengajar bina diri pada anak tunagrahita, dan cara mengajar bina gerak pada anak tunadaksa. Hasilnya setelah diberikan pelatihan masyarakat jadi tahu dan mampu mengajar ABK dengan baik. Kriteria baik disini menunjukkan pemahaman masyarakat pada ABK dan keterampilan dalam mengajarnya. Pelatihan ini dilanjutkan dengan pendampingan praktek langsung mengajar ABK.

Ternyata dengan model pendidikan melalui pemberdayaan masyarakat hasilnya efektif dapat meningkatkan potensi ABK secara optimal, terbukti dengan hasil evaluasi proses dan evaluasi hasil setelah diajar oleh masyarakat/kader yang sudah dilatih materi-materi seperti di atas, ABK jadi mampu membaca, menulis, berhitung, melakukan kegiatan hidup sehari-hari, dan keterampilan dasar seperti membuat kerajinan tangan, bunga, boneka, dlsb. Pada tahun kedua ABK mampu membaca menulis huruf Braille, mampu berbahasa isyarat, mampu merawat dirinya sendiri seperti menggosok gigi, makan dan minum, dan mampu menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku dengan benar.

2. Pembahasan

Model pendidikan bagi ABK yang miskin di pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat ini diawali dengan pelatihan pada masyarakat atau kader yang peduli tentang cara mengajar ABK. Dilanjutkan dengan pendampingan dalam mengajar ABK. Materi pelatihan yang dilatihkan adalah tentang pendidikan dasar dan praktis seperti calistung, kegiatan hidup sehari-hari, keterampilan dasar, membaca menulis huruf braille, bahasa isyarat, bina diri, dan bina gerak. Materi dikemas secara sederhana agar mudah dipahami dan mudah mengajarkannya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan luar sekolah bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan keluarga dan masyarakat selain bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan pengetahuan umum juga memberikan keterampilan dasar lainnya yang praktis dan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah diterapkan ternyata dapat memecahkan masalah pendidikan ABK yang miskin di pedesaan, karena dengan melalui pemberdayaan masyarakat yang peduli, biaya pendidikan menjadi tidak mahal, sehingga terjangkau oleh ABK yang miskin di pedesaan. ABK tidak perlu pergi ke kota untuk sekolah di SLB.

Masyarakat yang menjadi kader ternyata juga terdiri dari para guru umum mulai dari guru TK, SD, dan SMP, sehingga para guru tersebut yang tadinya tidak tahu dan tidak mampu mengajar ABK yang ada di sekolahnya, setelah mengikuti pelatihan jadi tahu dan mampu mengajar ABK. Dengan demikian ABK yang belajar di sekolahnya akan tertangani dengan maksimal.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah mencapai tujuannya, yaitu menemukan model pendidikan yang efektif bagi ABK yang miskin di pedesaan. Dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan psikologis, maka model pendidikan yang efektif bagi ABK yang miskin di pedesaan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat di kecamatan Sukanagara ternyata memiliki potensi yang dapat diberdayakan untuk mengajar ABK.

Prosesnya diawali dari pelatihan masyarakat/kader tentang cara mengajar ABK, dilanjutkan dengan pendampingan dalam mengajar ABK, pelaksanaan mengajar ABK oleh masyarakat/kader sendiri, dan evaluasi baik pada masyarakat maupun pada ABK yang diajar. Setelah diteliti, model pendidikan seperti ini ternyata efektif dapat meningkatkan potensi ABK secara optimal, terbukti dari hasil evaluasi proses dan hasil belajarnya yang meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar model pendidikan ini diterapkan di desa-desa yang belum ada atau jauh sekolahnya karena terbukti dapat memecahkan masalah pemerataan belajar bagi ABK yang belum mendapatkan akses pendidikan, terutama bagi ABK yang miskin dan di pedesaan atau daerah terpencil.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. 1994. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. London: Sage Publications
- Haring, N., G.(ed.).(thied edition).1982. *Exceptional Children and Youth*. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Comp
- Reynold, M.C & Birch, J.W. 1988. *Adaptive Mainstreaming; A Primer for Teachers and Principals*. New York: John Wiley.
- Smith, J. D. 2006. *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*, Bandung: Nuansa. (Penerjemah: Denis, Ny.Enrica).
- Stubbs, Sue. 2002 *Inclusive Education: Where There Are Few Resources*. The Atlas Alliance: Gronland , Oslo.

Sunardi. 1997. *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Depdikbud
Dirjen Dikti PPTA.

Werner, David. 1987. *Disable Village Children*. USA: The Herperian Foundation.

WHO, 1983. *Training Disable People in The Community*. USA: WHO.